



KLIPING

MASS MEDIA

- FAJAR TRIBUN SEPUTAR INDONESIA BISNIS INDONESIA
 KOMPAS REPUBLIKA UJUNG Pandang EKSPRES KORAN TEMPO

TANGGAL :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
														✓																

BULAN :

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	✓										

TAHUN

HAL

2012

28

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Cornell Syarief P

Berharap 15

Kabupaten Raih

WTP



KLIPING

MASS MEDIA

FAJAR TRIBUN SEPUTAR INDONESIA BISNIS INDONESIA
 KOMPAS REPUBLIKA UJUNG Pandang EKSPRES KORAN TEMPO

TANGGAL :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
														✓																

BULAN :

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	✓										

TAHUN

2012

HAL

28

DALAM rangka akuntabilitas dan transparansi sektor publik dan sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara, BPK memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Seperti apa dan bagaimana upaya yang dilakukan BPK, berikut petikan wawancara dengan Kakan BPK RI Perwakilan Sulsel, Cornell Syarief P, bersama wartawan *Fajar*, **Amrullah Basri** pekan lalu.

BPK intens melakukan audit dan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah selama ini. Seperti apa jenis pemeriksaan yang dilakukan?

Ada tiga jenis pemeriksaan yang ada. Pertama pemeriksaan keuangan, kedua, pemeriksaan kinerja, dan ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Seperti apa pemeriksaan keuangan itu?

Audit laporan keuangan dilakukan terhadap laporan pengelolaan anggaran yang dikelola pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Hasil audit terhadap laporan keuangan itulah yang nantinya diberikan pemerintah daerah ke DPRD. Dari hasil audit terhadap laporan keuangan itu pula BPK

akan memberikan opini.

Apakah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian, atau disclaimer. Suatu pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu sudah bagus. Contohnya aset yang dilaporkan pemerintah kabupaten X, nilainya Rp1 triliun. Saat dilakukan pengujian, nilai aset sebesar Rp1 triliun yang terdiri dari aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan, memang benar adanya. Demikian pula dengan belanja-belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah selama satu tahun.

Dengan opini WTP, apa dapat dikatakan nihil kerugian?

Bukan karena mendapatkan opini WTP, lantas sama sekali disebut tidak ada permasalahan. Tidak seperti itu. Memang di situ ada, tapi tidak material.





KLIPING

MASS MEDIA

FAJAR TRIBUN SEPUTAR INDONESIA BISNIS INDONESIA
 KOMPAS REPUBLIKA UJUNG Pandang EKSPRES KORAN TEMPO

TANGGAL :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
														✓																

BULAN :

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	✓										

TAHUN

2012

HAL

28

Sempat dikatakan ada temuan inspektorat sebanyak 544. Ini bisa jadi berpengaruh terhadap opini bisa jadi juga tidak. Sebab, kita akan mengkaji semua temuan itu.

Kemarin (beberapa waktu lalu) saya sempat bilang kalau ada kerugian Rp100 juta atau Rp200 juta, sementara anggaran belanjanya mencapai Rp1 triliun atau Rp2,4 triliun, tentu tidak material. Sebab, nilai itu tidak sebanding dengan nilai triliun rupiah itu dan tidak akan berpengaruh terhadap opini.

Berbicara WTP, apakah ada target?

Iya. Tahun 2014, kami targetkan 60 persen entitas mendapatkan WTP. Jadi, kalau di Sulsel ada 25 entitas, yaitu, satu Pemprov dan 24 pemerintah kabupaten/kota, berarti diharapkan ada 15 pemerintah daerah yang mampu mendapatkan opini WTP.

WTP itu merupakan prestasi pemerintah daerah itu sendiri. Karena, mereka mencatat, melaporkan proses pengadaan dengan bukti-bukti secara tertib. Dengan begini, barulah BK mengatakan laporan yang disampaikan itu wajar. Kalau laporannya dis-claimer, BPK tidak bisa memberikan pendapat apa-apa.

Upaya untuk mencapai itu?

BPK berupaya menempuh beberapa cara untuk mendorong pemerintah daerah, agar secepatnya mendapatkan WTP. Kami membuka komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Apa yang menjadi masalah akan dicari. Karena, bisa saja mereka tidak mengerti. Dengan membangun dan meningkatkan kualitas komunikasi permasalahan-permasalahan dapat dipahami de-

ngan betul dan jelas.

Kalau sudah dipahami barulah dicari solusinya sampai bagaimana mereka melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat pemda bisa paham permasalahannya dan tahu solusinya. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk action plan-nya dalam mengatasi masalah.

Itu jangka panjang. Bagaimana dengan jangka pendeknya?

Tahun ini kami ingin membenahi masalah aset. Karena setelah kami lihat, hampir seluruh pemerintah daerah bermasalah di aset. Kecuali Luwu Utara. Makanya tahun ini BPK akan memetakan masalah aset. Apa saja masalahnya, kemudian, kita meminta kepada pemerintah daerah apa saja yang menjadi hambatannya.

BPK akan menghimpun semua permasalahan dan mencari solusinya. Solusinya kita bisa memanggil dari Kemenkeu, Kemendagri, bisa juga daerah yang menjadi sampel seperti, Luwu Utara. Kita yakin, pengelolaan aset yang dilakukan Pemkab Luwu Utara memang bagus. Atau bisa juga dengan konsultan yang ditunjuk pemerintah daerah itu.

Apakah konsultan, BPK, atau lainnya. Itu jauh lebih baik. Jadi, tinggal bagaimana sikap pemerintah daerah itu. Yang jelas, dengan begitu mereka tahu bagaimana mengelola aset. Dengan mengetahui secara persis, tentu dalam setiap ada permasalahan solusinya juga akan jelas.

Contoh masalah aset yang Anda maksud?

Sekolah misalnya. Dulu masyarakat mengatakan silahkan bangun, silahkan bangun. Sekarang mereka justru menuntut tanahnya, kalau tanah itu merupakan tanah masyarakat. Itu kan suatu masalah bagi pemerintah daerah. Dari sini BPK akan mencari solusinya. (*)

DATA DIRI

- Nama: Ir Cornell Syarief P, MM
- Lahir: Bandung, 4 Mei 1959
- Jabatan: Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel
- Pangkat: Pembina Utama Muda
- Golongan: IVc
- Anak: 4 orang
- Pendidikan: Magister Manajemen Keuangan Universitas Satyagama



FOTO: JUMAIN SULAIMAN/FAJAR